

# KEKUASAAN NEGARA DAN STRUKTUR EKONOMI-POLITIK

## Oleh Triyono Lukmantoro

### (KOMENTAR)

=====  
Arief Budiman,  
*Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*  
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996)  
x + 134 halaman.  
=====

Ketika persoalan masyarakat sipil (*civil society*) menjadi sentral perbincangan dan pembahasan dalam perkembangan politik dan demokratisasi,<sup>1</sup> Arief Budiman justru melakukan analisis terhadap keberadaan negara. Mungkinkah Arief mencoba untuk “mengalihkan” diskursus *civil society* ke arah pembahasan terhadap negara (*state*), karena alasan-alasan tertentu serta fenomena politik kontemporer yang masih dominan ditentukan negara? Misalnya saja semakin terlihat bahwa gerakan masyarakat sipil tidak mampu melakukan tawar-menawar kepentingan dan kekuasaan dengan pihak negara. Sementara itu negara semakin menunjukkan kekuatannya sebagai sentrum kekuasaan yang tidak mungkin tertandingkan dan terbantahkan. Atau, kemungkinan pula Arief ingin menunjukkan struktur bangunan negara, baik dalam tataran fisik-material maupun abstrak-filosofis, untuk melakukan perombakan terhadap kecenderungan terciptanya etatisme yang semakin menguat.

Meskipun pembahasan Arief terhadap keberadaan negara ini tidak dalam konteks Indonesia, tetapi dari gagasan utama yang disampaikan dapat dibaca bahwa Arief melakukan “pembangkaian” analisisnya dalam situasi negara Orde Baru. Jelas, Arief sendiri sama sekali tidak menyebut-nyebut identitas nama Orde Baru. Tetapi, dari identifikasi serta berbagai proposisi yang dikemukakannya, Arief mencoba melakukan pembedahan secara implisit terhadap negara Orde Baru dalam semangat teori negara yang lebih universal dan sama sekali

---

<sup>1</sup>Lihat, misalnya, Muhammad A.S. Hikam, “Demokratisasi Melalui “Civil Society”: Sebuah Tatapan Reflektif atas Indonesia,” *Prisma* No. 6 Tahun XXII 1993. Gejala menguatnya pembahasan terhadap masyarakat sipil dapat juga dilihat dari terbitnya sejumlah buku, seperti misalnya: F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 1993); Ellyasa K.H. Darwis (ed.), *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LKiS, 1994); dan Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil*, penerj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1995).

bebas konteks. Arief melakukan pembahasan dengan “gaya karambol”, yang berarti menembak sasaran secara tidak langsung, namun pada akhirnya nanti juga mengena pada target yang dituju.

Sehingga dapat dikatakan (dengan menggunakan paradigma Derridean) bahwa “teks” pembahasan Arief terhadap negara haruslah dibaca secara “intertekstual”: kelahiran suatu teks pastilah karena ada teks lain yang telah mendahului. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa Arief membahas negara dengan berbagai aspeknya, karena negara Orde Baru pada pertengahan dekade 1990-an ini justru semakin memperlihatkan kekuatannya (*powerfull*), sehingga semakin mempersempit ruang gerak masyarakat sipil. Ini dapat ditunjukkan dengan pernyataan Arief bahwa buku yang ditulisnya berfungsi sebagai pengantar dalam membicarakan teori-teori negara dan dapat dijadikan sebagai alat analisis sederhana terhadap keadaan negara di berbagai negeri. Namun, yang paling penting adalah pernyataan Arief bahwa “bagi para praktisi politik dan aktivis lainnya, buku ini semoga bisa mereka pakai untuk merancang strategi dan taktik yang lebih baik dalam memperjuangkan perubahan negara dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Mereka akan lebih memahami aspek negara mana yang harus mereka ubah, dan perubahan apa yang realistis bisa diharapkan” (*hal. 124*). Bahkan Arief sendiri menyatakan bahwa analisis yang dikemukakannya tidak sekedar teks yang memberikan deskripsi mengenai berbagai teori negara, melainkan Arief juga akan menunjukkan sikapnya terhadap teori negara yang dianggap ideal (*hal. 4*). Tentu nuansa yang diciptakan dengan nada keberpihakan semacam itu sangat berbeda dengan analisis Arief yang netral terhadap perkembangan teori-teori pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga.<sup>2</sup>

### **Pelebagaan Kekuasaan**

Hubungan antara negara dan kekuasaan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi, dan dengan kekuasaan itu pula negara melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya. Dalam kaitan ini Arief menyatakan bahwa kekuasaan negara yang sedemikian besar akibat negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum (*hal. 3*). Sejumlah teoritis juga menyatakan bahwa negara berhak serta mempunyai kekuasaan penuh terhadap masyarakatnya. Hal ini, misalnya, diwakili oleh

---

<sup>2</sup>Lihat Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: Gramedia, 1995).

pandangan Plato dan Aristoteles, agama Kristen (yang diwakili oleh institusi gerejanya), Grotius dan Hobbes, serta Hegel.

Dalam berbagai analisis terhadap pemikiran para teoritis tersebut, seringkali, muncul suatu tendensi untuk melakukan kecaman. Thomas Hobbes seringkali dikecam karena pandangan-pandangannya yang ekstrem dalam mendudukkan negara untuk mendapatkan otoritas tertinggi. Bahkan Hobbes sendiri menyatakan secara tegas bahwa ketakutan yang diciptakan oleh kekuasaan (negara) akan menjadikan penguasaan semakin efektif. Sebab, dengan cara demikian, masyarakat yang diliputi oleh berbagai ketakutan secara otomatis bergerak bagaikan jarum jam. Di sinilah Hobbes mendambakan negara sebagaimana layaknya *Leviathan*. Namun, pandangan Hobbes yang sangat ekstrem itu haruslah diketahui konteks kelahirannya. Karena, apabila membaca pikiran-pikiran Hobbes sama sekali tercerabut dari peristiwa yang mendahuluinya, akan melahirkan berbagai penilaian yang sangat a-historis.<sup>3</sup>

Demikian juga pendapat Hegel mengenai negara integral yang seolah-olah bersifat totaliter serta mengungkung masyarakat tanpa memberikan ruang gerak sedikit pun. Bayangan Hegel mengenai keberadaan negara adalah suatu lembaga kekuasaan yang rasional. Dalam lembaga negara tersebut haruslah didukung oleh aparat-aparat yang bersih, terutama dari tindak korupsi. Bahkan, dalam pandangan Hegel, negara menjadi sarana bagi masyarakat untuk menemukan kebebasannya yang hakiki. Maka negara menjadi institusi yang menuntun masyarakat ke arah kesempurnaan sejarah. Negara mempunyai kedudukan sebagai roh obyektif yang mampu mewedahi roh-roh subyektif dalam masyarakat.<sup>4</sup> Kalau teori negara Hegelian ini kemudian diterapkan secara fasistik oleh Hitler, barangkali inilah salah satu strategi penguasaan di mana filsafat dijadikan ideologi pembenaran. Bukankah Hegel yang secara brilian mengajarkan persoalan dialektika sejarah, yang intinya justru pada pandangan yang bersifat negativisme, yakni selalu mempertanyakan keadaan yang serba mapan? Demikian juga pandangan negara integralistik Soepomo yang secara dominan dipengaruhi oleh Hegelianisme, sehingga memunculkan pandangan *manunggaling kawula-Gusti* (menyatunya Tuan-hamba). Agaknya Soepomo memadukan secara eklektik antara filsafat negara Hegel dengan pandangan kekuasaan Jawa yang sangat feodalistis.

---

<sup>3</sup>Lihat, misalnya, Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Gramedia, 1995).

<sup>4</sup>Lihat, misalnya, A. Widyarsono, "Paham Negara Rasional Hegel dalam Filsafat Hukumnya," *Driyarkara* No. 3 Tahun XVIII 1992, dan Franz Magnis-Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1993).

Konklusi yang dapat dipahami dari berbagai pandangan teoritis yang memposisikan negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi adalah bahwa negara dipandang selalu dapat bertindak netral. Negara secara inheren di dalam dirinya mempunyai tujuan-tujuan baik bagi masyarakat, serta tidak mungkin akan merugikan kehidupan warganya. Inilah pandangan teori Negara Organik. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Teori Marxisme-Leninisme di mana negara merupakan perwujudan dari *diktatur proletariat*. Dalam kondisi ini, negara berfungsi sebagai perealisasi dari masyarakat yang egaliterian untuk menuju sebuah akhir sejarah, yaitu masyarakat komunisme yang tanpa kelas. Artinya adalah kemutlakan negara sangat dibutuhkan pada saat berlangsungnya peralihan dari sosialisme ke komunisme. Apabila masyarakat yang sama-rata sama-rasa sudah tercipta, maka lembaga negara tidak lagi diperlukan.

Namun dalam proses selanjutnya, justru acapkali negara menjadi lembaga yang sangat otonom serta sama sekali telah mengabaikan berbagai kepentingan masyarakatnya. Negara bahkan selalu difungsikan sebagai alat serta mesin pembenar bagi aparatusnya untuk melakukan represi. Maka, hubungan negara dengan masyarakat tidak selalu dalam kondisi yang harmonis dan saling mengisi. Justru antara negara dan masyarakat berdiri dalam posisi yang saling berlawanan. Relasi yang tercipta adalah keinginan untuk saling menundukkan. Karena, negara tidak lagi menjadi “kendaraan” bagi masyarakat untuk mencapai proses progresivitas sejarah pada titik kemuliaan. Namun, justru sebagai lembaga kekuasaan yang menciptakan relasi-relasi konfliktual.

Di sinilah muncul relevansi Teori Negara Marxis yang menyatakan bahwa negara tidak lebih sebagai alat bagi kelas yang berkuasa untuk melakukan penindasan terhadap masyarakat. Netralitas negara pun menjadi tidak akan pernah terwujud. Apabila dilihat secara lebih komprehensif, Arief sendiri sudah mengemukakan pendapat bahwa bentuk negara berdasarkan netralitasnya dapat dibagi menjadi empat, yaitu: (1) *Negara Pluralis*, negara dalam kedudukan tidak mandiri, karena mempunyai sifat demokratis. Yaitu, menerima partisipasi dan usulan-usulan secara penuh dari kalangan masyarakat; (2) *Negara Marxis*, negara yang juga tidak otonom, karena digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk mewujudkan berbagai kepentingannya; (3) *Negara Organik*, negara sama sekali otonom, karena berinisiatif sendiri untuk mengambil berbagai kebijakannya; (4) *Negara Korporatis*, kedudukan negara relatif mandiri, karena mendengarkan berbagai usulan dari wakil masyarakat. Dalam bentuk negara ini, negara menentukan kelompok-kelompok tertentu yang boleh memberikan usulan.

Sehingga demokrasi yang berjalan pun lebih bersifat *top-down*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Arief Budiman, “Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan,” *Prisma* No. 7 Tahun XI Juli 1982. Yang menjadi sedikit mengejutkan dan “aneh” mengapa justru dalam membahas netralitas dan kepentingan ekonomi yang dikelola negara, Arief tidak mencantumkan formula-formula ini.

Hal lain yang juga pantas untuk dipahami adalah terciptanya kecenderungan lahirnya negara otoriter atau demokratis. Dalam hal ini, Arief mengemukakan beberapa faktor, yaitu: (1) *Ekonomi*, bahwa kebijakan ekonomi yang diambil negara sangat menentukan sistem politik yang dijalankan. Dalam hal ini, Arief menolak adanya anggapan yang sudah populer bahwa sistem ekonomi kapitalisme pastilah menciptakan demokrasi. Sebab, dalam kenyataannya, justru kapitalisme yang dikembangkan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan sifat otoriter. Kapitalisme yang demokratis hanya akan terjadi pada negara-negara yang sudah kaya;<sup>6</sup> (2) *Sosial*, yang merupakan berbagai kombinasi dan interaksi dari kekuatan-kekuatan sosial yang terdapat dalam masyarakat, yang mempunyai pengaruh bagi terbentuknya suatu rezim tertentu; dan (3) *Budaya*, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan gagasan-gagasan atau pun nilai-nilai yang dihayati oleh seseorang atau masyarakat dalam alam pikirannya.

Walau dibahas secara terpisah, Arief dengan tegas menyatakan bahwa eksistensi negara juga tidak dapat dilepaskan dari ideologi serta legitimasi yang diterapkan. Kalau selama ini para teoritis Marxis Orthodox masih meyakini adanya *base* (yang tidak lain adalah ekonomi atau *mode of production*) sebagai penentu suprastruktur di mana salah satunya adalah ideologi, maka Gramsci dengan teori hegemoninya mencoba membalikkan logika berpikir itu. Suprastruktur atau ideologi tidak selamanya harus ditentukan oleh basis, karena masyarakat tidak harus diubah keadaan sosial-ekonominya untuk dapat dirombak pikirannya.

### **Jalan Strukturalis**

Seluruh bangunan analisis Arief terhadap keberadaan negara lebih banyak didominasi oleh hubungan antara ekonomi dan politik. Memang, banyak teoritis maupun filosof lain yang dijadikan bahan acuan olehnya. Namun, dalam berbagai pembahasan yang lebih substantif, Arief menampilkan keseriusan serta ketajamannya dalam persoalan-persoalan yang berkaitan secara kental dengan ekonomi-politik. Tampaknya, Arief ingin lebih kontekstual dan “membumi” dalam memahami negara. Berbagai pembahasan yang bersifat normatif dengan

---

<sup>6</sup>Dalam diskursus mengenai hubungan antara otoriterisme dan perkembangan kemajuan ekonomi dapat juga dijadikan komplemen untuk membahas hubungan antara faktor ekonomi dan negara. Arief sendiri menolak adanya logika bahwa otoriterisme yang diciptakan oleh birokrasi negara pastilah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Penolakan semacam itu dikemukakan Arief dalam membahas perkembangan ekonomi-politik di Indonesia dan Korea Selatan dengan menggunakan pisau analisis “negara otoriter-birokratis” O’Donnell. Selengkapnya baca Arief Budiman, *Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan* (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991). Bandingkan juga dengan Arief Budiman, “Sistem Perekonomian Pancasila, Kapitalisme dan Sosialisme,” *Prisma* No. 1 Tahun XI Januari 1982.

sejumlah hipotesis yang bersifat abstrak-filosofis sengaja dihindarinya. Sehingga pembahasan mengenai definisi (*what is*) kekuasaan tidak lagi dijabarkan secara terperinci, melainkan langsung didaratkannya pada kaitan dengan kebijakan perekonomian. Dan, Arief sendiri secara terang-terangan menegaskan bahwa negara tidak selalu akan mandiri dan semata-mata menjadi alat bagi kelas yang berkuasa. Menurut Arief, negara pada prinsipnya adalah memang mandiri, tetapi negara harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang membatasinya, yang dalam hal ini adalah kondisi struktural, yaitu sistem ekonomi-politik. Inilah yang menjadikan kemandirian negara selalu mengalami berbagai limitasi.

Uraian-uraian yang dikemukakan Arief memperlihatkan konsistensinya sebagai seorang pemikir yang bercorak strukturalisme. Tidak hanya itu, Arief sendiri menyatakan diri sebagai seorang strukturalis. Artinya adalah Arief lebih banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan dasar Marxisme dengan teori kelasnya.<sup>7</sup> Bahkan secara tegas Arief menolak analisis dengan berlandaskan teori kebudayaan (kultural), karena menurutnya lebih bersifat psikologistis. Lebih dari itu, Arief mengecam para intelektual Indonesia yang masih sering menerapkan teori kultural sebagai tidak pernah bergaul dengan masyarakat bawah.<sup>8</sup> Kelemahan-kelemahan lain yang terdapat dalam teori kebudayaan, menurut Arief, adalah: *Pertama*, sifatnya yang a-historis. Kebudayaan kurang dikaitkan dengan berbagai peristiwa sosial yang melingkupi lingkungan sosial sekitarnya. *Kedua*, persangkaan teori kebudayaan bahwa masyarakat adalah sesuatu yang mempunyai sifat homogen, tidak terdiri dari berbagai kelompok atau kelas yang beraneka-ragam.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Menurut Ariel Heryanto, Arief Budiman lebih banyak terpengaruh oleh Marxisme akibat secara kebetulan Arief mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Amerika Serikat. Padahal, pada saat itu (tepatnya pada akhir dekade 1960-an dan 1970-an) di sana sedang terjadi demam Marxisme. Sehingga Marxisme yang menjadi alat analisis Arief pun lebih bercorak khas Marxisme Amerika tahun 1970-an. Lihat Ariel Heryanto, "Kelas Menengah Indonesia: Tinjauan Kepustakaan," *Prisma* No. 4 Tahun XIX 1990.

<sup>8</sup>Lihat Arief Budiman, "Kebudayaan Politik dan Perubahan Sosial," dalam Ismid Hadad (ed.), *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1982).

<sup>9</sup>Arief Budiman, "Kebudayaan Kekuasaan atau Sosiologi Kekuasaan?," *Prisma* No. 3 Tahun XVI Maret 1987.

Tetapi, apakah teori kebudayaan sama sekali tidak sesuai untuk dijadikan komplemen bagi teori strukturalisme? Memang, selama ini teori-teori yang berdasarkan Marxisme tidak memperhitungkan sama sekali faktor-faktor kebudayaan yang lebih bersifat psikologis di suatu masyarakat. Namun, dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa dalam sejumlah kasus, seperti terjadinya ketergantungan negara pinggiran (*periferal*) terhadap negara pusat (*core*) dalam kaitannya dengan Teori Dependensi, ternyata mempunyai relevansi dengan faktor kebudayaan yang berkembang dalam negara yang bersangkutan. Bahkan perilaku kekuasaan pun tidak terlepas dari nilai budaya yang sedang dianut dan dikembangkan melalui berbagai pelembagaan. Maka budaya dalam hal ini bukanlah sesuatu yang bersifat statis dan a-historis.<sup>10</sup> Dalam kasus yang lebih konkret dapat dilihat dengan kegagalan organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang akan mewujudkan radikalisme bagi para petani. Kegagalan itu lebih bersifat kultural daripada ekonomis-struktural, misalnya akibat masih kentalnya hubungan famili antara pemilik tanah dan pekerja, serta sistem nilai kepercayaan yang dianut masyarakat masih memperlihatkan pengaruh yang sangat kuat.<sup>11</sup> Bahkan dalam upaya untuk mempengaruhi dan bahkan mengubah kebijakan negara tidaklah gampang untuk dilakukan. Kasus gerakan mahasiswa, misalnya, menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan negara dengan masyarakat yang diwakili mahasiswa tidak selalu dapat diselesaikan dengan perhitungan-perhitungan struktural. Arief sendiri mengakui bahwa dalam kasus gerakan mahasiswa, faktor-faktor kebudayaan sangat mempunyai peranan yang determinan di dalamnya.<sup>12</sup>

Jelas, dengan memperhitungkan bahwa teori kebudayaan lebih bersifat idealistis (berangkat dari dalam pemikiran), sedangkan teori struktural lebih bersifat materialistis (berangkat dari sejumlah kondisi sosial yang sedang berlangsung), Arief tampaknya tidak sudi untuk melakukan perpaduan terhadap hal yang dianggapnya saling bertentangan itu. Sehingga, inilah yang menjadikan analisisnya menjadi kedodoran, apalagi sebagai suatu petunjuk praktis dan sederhana bagi para aktivis untuk melakukan perubahan terhadap bangunan negara. Arief

---

<sup>10</sup>Lihat Mochtar Pabottinggi, "Kebudayaan dalam Pergerakan Pro Sistem atau Anti Sistem di Dunia Ketiga," *Prisma* No. 9 Tahun XII September 1983.

<sup>11</sup>Lihat Kuntowijoyo, "Masyarakat Desa dan Radikalisme Petani," dalam *Radikalisme Petani* (Yogyakarta: Benteng, 1993).

<sup>12</sup>Arief Budiman, "Peranan Mahasiswa sebagai Intelektual," *Prisma* No. 11 Tahun V November 1976.



sendiri, misalnya, hanya menonjolkan aparatus negara semata-mata pada bagian birokrasi, yang *nota bene* lebih sering mengurus persoalan perekonomian dan perizinan. Padahal, kalau model aparatus negara dari Louis Althusser diterapkan, tentunya akan lebih baik untuk memberikan deskripsi mengapa negara dengan segenap perilaku represinya dapat diterima masyarakat.

Althusser mampu menjelaskan hubungan itu dengan menjabarkan adanya dua aparatus negara yang bekerja, yaitu *Pertama*, aparatus negara represif (*Repressive State Apparatus*) yang dalam tugasnya menggunakan cara-cara kekerasan atau koersif. Tugas ini dilakukan oleh tentara, polisi, serta aparatus militer yang lainnya. *Kedua*, aparatus negara ideologis (*Ideological State Apparatus*) yang mempunyai tugas menyebarkan berbagai wacana atau pun ideologi negara, sehingga masyarakat secara suka rela tunduk terhadap kekuasaan negara. Tugas ini dijalankan melalui jalur pendidikan atau media massa. Tugas kedua aparatus negara ini adalah saling berkaitan. Aparatus negara ideologis bertugas memberikan berbagai pembenaran atau aturan main bagi aparatus negara represif dalam menjalankan tugasnya. Sehingga pada saat aparat militer melakukan penindasan secara fisik dengan kekerasan yang luar biasa, tetap saja dapat dibenarkan. Bukankah telah ada undang-undang yang memberikan legitimasi bagi aparat ini untuk melakukan hal tersebut? Paradigma Althusserian ini jelas sangat membantu untuk menjelaskan konsepsi Gramsci mengenai hegemoni.

Usaha Arief dengan perhitungan-perhitungan strukturalnya juga akan banyak sekali mengalami kesulitan dalam mengajak masyarakat mencoba melakukan perubahan terhadap bangunan negara. Bukankah setiap kali masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, parlemen, serta pers, melakukan kritik dan kontrol terhadap negara, selalu saja dihambat oleh perhitungan-perhitungan kebudayaan? Ungkapan-ungkapan yang bermuara pada permasalahan budaya politik jelas menjadi bukti yang paling nyata. Budaya dalam hal ini tidak lagi diciptakan sebagai sistem nilai yang dianut. Tetapi, dalam kedudukan demikian, budaya juga mempunyai sifat secara ideologis (suatu kesadaran palsu, *false consciousness*) yang justru menyelubungi kesadaran kritis masyarakat. Melalui ungkapan budaya politik itu pula berbagai pembenaran dapat diambil untuk melakukan berbagai tindakan reperiensi.

Jelas, yang dibutuhkan Arief tidaklah semata-mata perhitungan dengan berdasarkan teori strukturalisme, tetapi juga poststrukturalisme. Kesulitan utama memasukkan poststrukturalisme dalam kajian negara Arief adalah keasyikannya serta keyakinannya yang begitu berlebihan dengan kebenaran teori strukturalismenya. Padahal, melalui paradigma

Foucauldian, misalnya, Arief dapat mencoba melakukan penelaahan relasi antara pengetahuan dan kekuasaan (*power/knowledge*) di mana kekuasaan adalah pengetahuan. Sebab, kekuasaan dalam relasi yang demikian mempunyai kedudukan yang kuat dan mutlak tentang kebenaran (*truth*) sesuatu hal. Kekuasaan dengan demikian bukanlah suatu kekuatan politik yang selalu melakukan represi. Kekuasaan justru bernilai positif dan produktif, karena melahirkan berbagai pengetahuan.

Atau dapat juga terlihat bahwa Arief melupakan keberadaan formula “negara integral” sebagaimana pernah diungkapkan Gramsci, yaitu suatu negara yang sudah memegang kedudukan hegemonik, namun tetap saja melakukan tindak kekerasan secara fisik terhadap masyarakat. Jadi, perpaduan antara aparatus negara represif dan ideologis dipadukan secara ketat. Melalui analisis dengan prinsip-prinsip dasar poststrukturalisme ini, sebenarnya, Arief menjadi tidak sekedar melulu berkubang pada pembahasan hubungan negara dengan *mode of production*, tetapi juga mampu memperluas relasi negara dalam menciptakan *mode of information* serta *mode of discourse*.

Hal ini berarti bahwa negara tempat Arief hidup dan yang menjadi sasaran analisisnya adalah dalam kondisi kapitalisme awal, tetapi tingkat konsumsi masyarakatnya sudah sedemikian tinggi. Negara memang sudah dalam posisi hegemonik yang tidak tergoyahkan, sementara tindak kekerasan militeristik masih sering diterapkan. Negara tidak saja mengatur hubungan-hubungan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomis yang bersifat kolusif, tetapi juga secara ketat masih mengontrol produksi informasi bagi masyarakatnya. Demikian juga, persoalan bahasa politik pun masih secara ketat dikendalikan negara. Padahal, dalam bahasa inilah berbagai pandangan ideologis diciptakan dan gampang merasuk dalam masyarakat. Sebab, sebagaimana diungkapkan Derrida, hanya melalui bahasalah manusia berbicara serta berpikir: semuanya terletak dalam bahasa. Begitulah, kalau Arief akan mengajak para aktivis dan praktisi politik untuk mengubah bangunan negara yang begitu kuat, tidak cukup hanya dengan satu jalan. Banyak jalan menuju perubahan dan perombakan: salah satunya adalah dekonstruksi. Mengapa Arief tidak sesekali memadukan antara “revolusi” dan dekonstruksi, setidaknya untuk menyajikan berbagai analisis terhadap kekuasaan, apalagi yang menyangkut eksistensi negara? Apakah keyakinan Arief dengan teori strukturalismenya secara berlebihan itu masih relevan untuk membahas secara kritis kondisi negara dalam era kontemporer seperti sekarang ini? Tidakkah Arief dapat melihat bahwa penguasaan negara terhadap masyarakat

selalu mengkombinasikan antara bentuk kekerasan yang sangat menakutkan dengan penanaman pengetahuan melalui bahasa yang sangat ideologis?

\* \* \*